



SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: KONEKTIVITAS SEBAGAI SIMPUL KEMISKINAN DAERAH KEPULAUAN

Systematic Literature Review: Connectivity as A Node Islands Regional Poverty

Azinar Sofyan^{1*}, Jopie Tamtelahitu², Jeanee B. Nikijuluw³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*e-mail Correspondence Author: azinarsfy@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 05 November 2024

Direvisi: 19 November 2024

Disetujui: 01 Desember 2024

ABSTRAK

Isu kemiskinan hingga saat ini masih terus diperdebatkan berbagai kalangan dan pemerhati masalah kemiskinan. Dimana, kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kajian-kajian terkait kemiskinan selama ini menyoroti variabel makro ekonomi. Sementara, kenyataannya geografis wilayah Maluku merupakan wilayah kepulauan. Sehingga, penanganan kemiskinan pada wilayah kepulauan memerlukan strategi tersendiri dibandingkan penanganan kemiskinan pada wilayah kontinental. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review. Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan. Proses ini di awali dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih studi yang akan dianalisis. Hasil penelitian menggambarkan jika, Kemiskinan menjadi permasalahan yang bersifat multidimensional sehingga upaya penanganannya tidak hanya dapat mengandalkan faktor ekonomi semata saja. Akan tetapi memerlukan beragam penanganan dengan turut melibatkan masyarakat. Kemiskinan pada wilayah kepulauan selama ini masih erat dikaji melalui variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan dan sebagainya. Terlebih lagi, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah seringkali belum tepat sasaran yakni masyarakat miskin. Hal tersebut makin diperumit dengan kenyataan bahwa, daerah kepulauan memiliki kelemahan terkait konektivitas antar pulau pada wilayah kepulauan tersebut. Sehingga upaya penanganan kemiskinan melalui kebijakan dan program kerja pada wilayah kepulauan perlu mempertimbangkan konektivitas antar pulau.

Kata Kunci

Kemiskinan; Daerah Kepulauan;
Determinan; dan Upaya
penanganan kemiskinan



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman, FEB Pattimura University. E-ISSN: 3026-4472

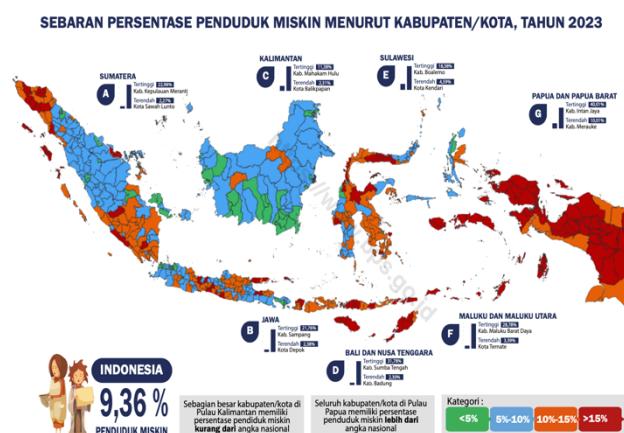
PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan krusial yang perlu ditangani secara serius. Dimana, kemiskinan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial bahkan budaya

sekalipun. Selain itu, bila kemiskinan tidak ditangani secara tepat, maka akan menimbulkan permasalahan sosial hingga meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Terlebih selama ini, kajian-kajian terkait kemiskinan lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi melalui pendapatan, sehingga penanganan kemiskinan pun lebih mengedepankan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Padahal, realitanya kemiskinan bukan saja berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata akan tetapi permasalahan sosial dan juga lainnya. Hal inilah yang mendorong berbagai kalangan untuk melakukan penelitian secara komprehensif terkait kemiskinan. Pada aras ini, penulis berpendapat bahwa, kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam pandangan para ekonom tradisional (klasik/neo-klasik) menyatakan bahwa, secara ekonomi masyarakat dikatakan sejahtera apabila mendapat kepuasaan atas barang dan jasa yang dikonsumsi (*optimal utility*). Sementara, dari sisi sosial, justru kesejahteraan dapat terwujud bila jangkauan pelayanan oleh pemerintah dapat menyentuh upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat pada aras akar rumput (*grossroot*). Latuny & Matitaputty (2020), menyebutkan bahwa, dalam teori kesejahteraan (*welfare theory*) oleh kaum klasik, menyatakan jika kesejahteraan sosial bagi masyarakat itu dapat terwujud melalui mekanisme pasar. Dimana, alokasi sumber daya alam maupun faktor produksi lainnya yang digunakan dalam kegiatan ekonomi akan efisien dan redistribusi kesejahteraan akan tercapai melalui pajak progresif. Namun dalam kenyataannya yang muncul justru pasar itu tidak sempurna (*imperfect market*) melalui praktik-praktek monopolis, kartel, dan informasi yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan alokasi sumber daya alam maupun manusia menjadi tidak efisien dan menimbulkan ketidakadilan yang berdampak pada kemiskinan atau kesejahteraan.

Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki berbagai ragam potensi sumber daya alam yang mumpuni, akan tetapi justru kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kemiskinan yang dialami Propinsi Maluku. Dimana, data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2023) menyatakan bahwa, Maluku menempati urutan ke-4 sebagai daerah termiskina di Indonesia setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kenyataan kemiskinan yang dialami Propinsi Maluku makin diperparah dengan kondisi geografisnya yang terdiri atas 1.304 pulau-pulau kecil. Rentang kendali yang cukup jauh menjadi salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Propinsi Maluku sehingga masyarakat Maluku belum merasakan kesejahteraan dengan kepemilikan sumber daya alam yang beragam tersebut.



Sumber: BPS Indonesia, 2023

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Maret 2023

Kabupaten/Kota (1)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) (2)	Jumlah (000) (3)	Percentase (%) (4)
Kepulauan Tanimbar	615.768	27,64	24,47
Maluku Tenggara	669.140	22,02	21,79
Maluku Tengah	589.125	67,22	17,84
Buru	584.277	25,19	16,53
Kepulauan Aru	626.086	23,13	24,21
Seram Bagian Barat	486.747	38,87	22,39
Seram Bagian Timur	458.176	24,26	21,08
Maluku Barat Daya	658.036	21,23	28,78
Buru Selatan	743.721	9,77	15,28
Ambon	716.560	25,87	5,25
Tual	722.498	16,41	20,68
Provinsi Maluku	684.020	301,61	16,42

Sumber: BPS Propinsi Maluku, 2023

Data BPS Popinsi Maluku pada Maret 2023, memperlihatkan bahwa, Kabupaten Buru Selatan masih menjadi kabupaten yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp 743.721 per kapita per bulan. Sementara itu, Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi kabupaten dengan garis kemiskinan terendah yaitu Rp 458.176 per kapita per bulan. Jika dilihat besarnya jumlah penduduk miskin, Kabupaten Maluku Tengah menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar. Namun perlu diingat, proporsi jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah secara keseluruhan merupakan yang paling tinggi setelah Kota Ambon, sementara Kabupaten Buru Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terkecil, yaitu 9,77 ribu jiwa.

Kemiskinan di Maluku merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika

kemiskinan di wilayah ini, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Maluku adalah akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam akses terhadap layanan ini sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Muhtar Muhtar (2024) menekankan perlunya perbaikan akses pendidikan dan pelatihan sebagai langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, infrastruktur ekonomi yang lebih baik di daerah pedesaan juga diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Rakuasa (Rakuasa, 2023), yang menunjukkan bahwa peningkatan akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tuherea (2024) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pendidikan, kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Maluku Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masyarakat di Maluku dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih luas, sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Kemiskinan di Maluku juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan modal sosial yang ada di masyarakat. Kwalomine Kwalomine (2021) menjelaskan bahwa pemetaan masalah dan pendekatan terhadap modal sosial dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang akut di Maluku. Modal sosial, yang mencakup jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, dapat berfungsi sebagai sumber daya yang membantu masyarakat untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan membangun modal sosial yang kuat, masyarakat dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap berbagai tantangan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Maluku tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan pendidikan. Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting.

Hasudungan (2020) menunjukkan bahwa desegregasi pendidikan antara kelompok Muslim dan Kristen di Maluku dapat berkontribusi pada harmonisasi sosial dan pengurangan ketegangan antaragama. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat yang inklusif. Secara keseluruhan, kemiskinan di Maluku merupakan masalah yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Upaya untuk mengurangi kemiskinan harus melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta penguatan modal sosial. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama antar kelompok masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Berkaitan dengan kemiskinan, Sianturi et al (2021) menemukan jika ingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Secara parsial, tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, Arifin (2020) dan Wulandari et al (2022) justru menyatakan bahwa, pembangunan selama ini belum bisa "membebaskan" si miskin karena faktor budaya yang membelenggu. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan yang selama ini digulirkan pemerintah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan, meskipun secara nominal jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Selain itu pula dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan terdapat dua kategori penanggulangan kemiskinan, antara lain, pertama, Kebijakan tidak langsung, diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya

penanggulangan kemiskinan. Kedua, Kebijakan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta produktifitas sumber daya manusia.

Sementara itu, kemiskinan juga dapat dianalisis melalui kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengimplikasikan pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara (Purnomo & Danuta, 2022). Pendekatan lainnya dilakukan oleh Bahauddin et al (2021) melalui algoritma K-Means yang bertujuan untuk mengelompokan provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinannya agar pemerintah dapat memberikan kebijakan atau pendekatan yang tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi berdasarkan tingkat kemiskinan masing-masing provinsi. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat 3 cluster provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinannya yaitu Cluster 0 (provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah), Cluster 1 (provinsi tingkat kemiskinan sedang), dan Cluster 2 (provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi). Provinsi yang termasuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua.

Selanjutnya, kemiskinan pada daerah pedesaan dapat ditangani melalui pemberian bantuan Alokasi Dana Desa. Dimana, jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh positif signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan (Bukhari, 2021). Kajian terakhir yang dapat penulis temukan dilakukan oleh Iswardhana & Attamimi (2023) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan upaya pengurangan kemiskinan. Hasil penelitiannya menyatakan jika bentuk otonomi daerah Kabupaten Bandung Barat belum signifikan mengurangi kemiskinan, diantaranya banyaknya jalan rusak, infrastruktur kurang memadai, dan kurang tanggap penanganan bencana. Akibatnya, perekonomian Bandung Barat lemah menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi.

Berdasarkan pandangan sebelumnya tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kemiskinan pada daerah kepulauan dengan menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR). Metode SLR merupakan metode yang melibatkan proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan (Snyder, 2019). Dengan demikian, maka kajian ini dapat berkontribusi dan memperdalam pemahaman tentang determinan kemiskinan, terutama pada daerah kepulauan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review*). Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan. Proses ini di awali dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih studi yang akan dianalisis (Snyder, 2019). Kriteria inklusi meliputi: (1) Studi yang membahas determinan kemiskinan pada daerah kepulauan secara empiris dan (2) Studi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2019-2024). Sementara, kriteria eksklusi meliputi laporan berita, artikel, dan sumber sekunder.

Pencarian literatur dilakukan pada database akademik seperti Google Scholar, Neliti, Garuda, dan Science Direct maupun laporan dan publikasi dari instansi yang berkaitan dengan penulisan artikel ini, misalnya Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penggunaan kata kunci meliputi “determinan kemiskinan” dan “Kemiskinan Daerah Kepulauan” maupun kombinasi kata kunci lainnya yang relevan.



Proses peninjauan dilakukan dengan memanfaatkan kata-kata kunci tersebut pada database yang ditentukan. Hasil pencarian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan. Judul dan abstrak dari setiap hasil pencarian diperiksa untuk memastikan relevansinya dengan topik penelitian. Kemudian, artikel dan laporan yang memenuhi syarat diunduh dan dianalisis secara lebih mendalam. Referensi dari artikel yang relevan juga ditelusuri untuk mengidentifikasi sumber literatur tambahan yang mungkin tidak terdeteksi dalam pencarian awal.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber literatur. Metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren yang muncul dari literatur yang ditinjau. Temuan utama dikelompokkan dan disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara korupsi dan kemiskinan. Proses ini mencakup pengkodean dan kategorisasi data, serta identifikasi faktor-faktor yang memoderasi atau memediasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Studi kasus spesifik dari berbagai negara atau wilayah juga dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih kaya tentang determinan kemiskinan pada wilayah kepulauan dalam situasi nyata.

HASIL DAN DISKUSI

Kemiskinan menjadi permasalahan yang dihadapi semua negara di dunia dan berbagai usaha terus dilakukan pemerintah maupun individu yang bertujuan dapat mempertahankan keberlanjutan penghidupan rumah tangganya. Sementara, secara makro ekonomi, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan agar tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara atau daerah. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar erat kaitannya dengan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Kondisi juga mengisyaratkan bahwa, kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang bersifat alamiah saja, namun juga yang telah ditetapkan oleh aturan tentang kelayakan (Todaro & Smith, 2011). Penelusuran kajian ilmiah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan maupun upaya penanggulangannya, baik yang dilakukan pemerintah maupun pada tataran masyarakat.

Kemiskinan pada Wilayah Kepulauan

Penelusuran ilmiah yang dilakukan menunjukkan adanya berbagai faktor penyebab kemiskinan pada wilayah kepulauan, seperti yang diperlihatkan tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Determinan Kemiskinan pada Wilayah Kepulauan

Penulis & Tahun	Sumber		Metode Analisis	Temuan
	Publikasi	Data		
Neng Veni Suryani & Aning Kesuma Putri (2020)	Holistic Management Research Volume I, No.1, Juni 2020	BPS Propinsi Bangka Belitung	Kuantitatif deskriptif dengan analisis trend	Laju penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2014-2018 menurun dan semakin stabil. Penurunan tersebut dikarenakan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Faktor lainnya adalah karena mayoritas sumber

							penghidupan penduduk berada pada sektor primer (tambang dan pertanian).
Khoirun Nisa, Ayu Wulandari & Rini Luciani Rahayu (2020)	Sorot: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Volume 15, Nomor 1, April 2020: 55-63	BPS Kepulauan Bangka Belitung	Propinsi Propinsi Regresi sederhana.	linier	Ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
Ramli Rumeon, M. W. Talakua, E. R. Persulessy (2022)	Parameter: Jurnal Matematika, Statistika Dan Terapannya. Vol 01 No 01, April 2022.	BPS Maluku	Propinsi Propinsi Studi kasus dengan menerapkan penggunaan analisis diskriminan		Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam suatu kelompok berdasarkan variable terikat dan variabel bebas. Dengan menggunakan analisis diskriminan, terbukti bahwa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Maluku pada tahun 2015 adalah Pertumbuhan Ekonomi.		
Fitsmasari, Baso Iwang, Kamaruddin (2022)	ICOR: Journal of Regional Economics Vol. 01, No.01 Desember (2022)	Badan Statistik Kepulauan Selayar	Pusat Pusat	Regresi berganda	linear	Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hasi l lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	
Murbanto Sinaga, Sri Winda Hardiyanti Damanik, Rika Surianto Zalukhu, Rapat Piter Sony Hutauruk, Daniel Collyn (2023)	Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No. 1 Mei 2023	Badan Statistik Sumatera Utara	Pusat Pusat	Regresi data panel dengan pendekatan Random Effects Model (REM)		Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. Selanjutnya, pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. Pengujian simultan menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan per kapita dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias.	
Marnex Bokaraman, Hendri D Hahury, Rukmin W Payapo, Hermi Oppier (2023)	Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 4, No 4, Mei 2023, Hal 1160-1169	BPS Maluku	Kabupaten Tengah dan Hasil wawancara	Metode kuantitatif deskriptif		Determinan penyebab kemiskinan petani kopra berdasarkan temuan penelitian ini antara lain, keterbatasan akses terhadap aset, minimnya modal, keterampilan yang rendah dan terbatasnya pasar. Akibat berbagai kerentanan tersebut, maka petani dituntut untuk mencari alternatif sumber	

Jusman Sani, M. Irsyad, Neng Kamarni (2024)	Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma). Vol 04, No. 01. Maret 2024	Ekonomi Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kkuantitatif dengan menggunakan metode Asosiatif (Regrasi Linier Berganda)	pendapatan yang baru sebagai strategi mempertahankan penghidupan rumah tangganya.
				Secara parsial ketimpangan pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan jika kemiskinan pada wilayah kepulauan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan maupun pendapatan.

Penanggulangan Kemiskinan pada Wilayah Kepulauan

Pemerintah

Menyadari dampak yang dapat ditimbulkan oleh kemiskinan, maka pemerintah berupaya menanggulanginya dengan berbagai macam kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan melalui program-program bantuan terhadap masyarakat miskin. Baik berupa bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun program-program pemerintah lainnya dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 3. Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah

Penulis & Tahun	Sumber		Metode Analisis	Temuan	
	Publikasi	Data			
Elsjamina M Latuny, Izaac T. Matitaputty (2020)	Jurnal Kepulauan Pertanian Vol.4, No.1:30-36, 2020	BPS	Regresi panel dengan metode Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)	Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sangat bervariasi antara tiap Kabupaten/Kota. Kabupaten KKT mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pengeluaran pemerintah secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.	
Yetty, Chairullah Amin, Zulkifli Waibot (2021)	Journal of Fiscal and Regional Economy Studies. JFRES Vol 4 (1) (2021): 50 – 60	BPS	Analisis jalur untuk menjelaskan hubungan sebab akibat variabel konektivitas, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan.	Terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan positif konektivitas dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan negatif antar pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, dan hubungan negatif antar konektivitas dengan kemiskinan. Hasil ini menegaskan bahwa pengembangan konektivitas di wilayah pulau-pulau kecil dan kepulauan adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat pulau yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam pembangunan ekonominya.	
Siti Nikodemus Syarifah	Arieta, Niko, Ema	Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah	BPS	Kualitatif deskriptif dengan eksplorasi data	Belum adanya inisiatif pengarusutamaan gender (PUG) pada sektor pembangunan

Rahmaniah, Rupita, Teguh Setiandika Igiasi (2022)	Buton. Volume 8, No 3, Tahun 2022	primer sekunder berbasis repositori daring.	dan wisata perbatasan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Sehingga keterbatasan perempuan terhadap akses kepariwisataan ditandai dengan rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Artinya bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih perlu di evaluasi dalam pembangunan berkelanjutan daerah.	
Desi Ayurisyah Dominata (2022)	Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 2, Desember 2022	Diskusi/konsultasi melalui daring melalui teknologi informasi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Implementasi program JKN di Kepulauan Mentawai hingga Juni 2022 belum optimal karena faktor validitas data kepesertaan, layanan JKN yang tersedia saat ini terbatas pada jenis pasien prolaktin, dan masih ada sejumlah 25.122 jiwa (27,30%) penduduk Kepulauan Mentawai belum memiliki JKN. Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan infrastruktur, alat, obat, BHP (Suplay site), SDM Fasilitas kesehatan, serta kemudahan akses dana kapitasi yang mendukung implementasi program JKN di Kepulauan Mentawai.
Hendri D. Hahury, Max R. Wenno, Johanes M. S. Tetelepta, Billy J. Camerling, Febryano Saptenno, Fredy Louhenapessy, Revi W. Silooy, Hermi Oppier (2022)	Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol. 7, No. 3, 2022	Primer yang meliputi nelayan, pengusaha perikanan, pengumpul hasil perikanan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	Kombinasi antara pendidikan masyarakat yang berisi penyuluhan atau sosialisasi berupa focus group discussion (FGD) dan pendampingan terhadap masyarakat nelayan yang mengantungkan penghidupan rumah tangganya dari sektor perikanan.	Sumber daya perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya lebih banyak didominasi oleh para pengusaha perikanan daripada nelayan kecil. Umumnya hasil tangkap nelayan kecil dijual langsung pada pasar di kota Dobo. Adapun kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Terlebih lagi dengan beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan yang besar sehingga secara tidak langsung juga turut berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan kecil dan pada akhirnya justru membuat penghidupan masyarakat nelayan yang berada di tepi garis kemiskinan bisa saja terjerumus ke dalam kemiskinan yang jauh lebih parah.
Nur Ovaliani, Gusti Ayu Putu Candra Dewi, Riki Irmawan, Salma Nisa Adiyani, Fera Perdina Waani (2023)	Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 3 Issue 1, June 2023	BPS Maluku Propins	Pemetaan masalah akar	Penyebab kemiskinan yang terjadi di Kepulauan Romang adalah yaitu: 1.Kesulitan atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (economics scale) yang optimal dan menguntungkan dalam hal administrasi, usaha produksi, dan transportasi laut turut menghambat pembangunan.

							2.Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, seperti air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir (coastal ecosystem) dan satwa liar.
							3.Ukuran pulau yang kecil dan terisolasi, sehingga penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal, dan sumberdaya manusia yang handal menjadi sangat langka.
							4.Sarana Kesehatan, Pendidikan, Transportasi, Komunikasi dan Jalanan yang masih tidak memadai.
							5.Budaya lokal kadangkala bertentangan dengan kegiatan pembangunan.
Hasimuddin, Asri, Deddy Rahwandi Rahim (2023)	Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia Volume 4 Nomor 1 Februari 2023		Kualitatif dan kuantitatif. Analisis Jalur (Path Analysis)		Terdapat pengaruh Dana Desa (X1) Pembangunan Desa (X2) dan pemberdayaan masyarakat (Z) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. Ada pengaruh Dana Desa (X1). Pembangunan Desa (X2) dan Pemberdayaan Masyarakat (Z) secara simultan Terhadap Pengentasan Kemiskinan masyarakat desa Tanamalala kecamatan Pasimasunggu kabupaten Selayar Tidak ada pengaruh Dana Desa (X1) Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Z) masyarakat desa Tidak ada pengaruh Pembangunan Desa (X2) Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Z) masyarakat desa Tanamalala kecamatan Pasimasunggu kabupaten Selayar		
Yohanes Eki Apriliawan (2024)	Jurnal Archipelago Vol. 03 (1), p 127-137, Juni 2024	Data resmi yang digunakan pada penelitian ini adalah data Potensi Desa Tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik	Kuantitatif		Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pentingnya aksesibilitas infrastruktur keuangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Hasil pemodelan dengan menggunakan Spatial Error Model menunjukkan bahwa variabel jumlah Bank dan keberadaan ATM memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan GRDI. Semakin banyak jumlah Bank dan ketersediaan ATM di suatu wilayah, tingkat kemiskinan cenderung lebih rendah		
Rika Pertiwi, Sujianto, Dadang Mashur (2024)	Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and	Observasi (sumber data primer), teknik penunjang studi wawancara dan dokumentasi	Mix-method		Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan pada faktor ekonomi dan sosial tergolong tinggi.		

Temuan-temuan pada tabel di atas menggambarkan bahwa, kemiskinan pada wilayah kepulauan sangat berbeda dan bervariasi antar wilayahnya sehingga upaya penanganan yang dilakukan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi tersebut. Apalagi penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dalam kenyataannya seringkali salah sasaran dan menjadi tidak efektif. Kajian Imania et al (2022) menemukan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambutan Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan maksimal. Faktor komunikasi, sumber daya dan struktur menjadi faktor penghambat dalam implementasi program tersebut. Hal yang sama juga digambarkan oleh Rachma et al (2022) bahwa hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni: hambatan pada pelaksanaan (a) secara internal dan (b) secara eksternal. Selanjutnya adalah hambatan pada Pendamping Sosial.

Masyarakat

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memang sangat baik, akan tetapi hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi bergantung terhadap bantuan dari pemerintah saja. Padahal kenyataannya, pada kalangan masyarakat atau komunitas tertentu terdapat mekanisme yang dimanfaatkan untuk membantu mereka keluar dari kondisi kemiskinan, baik melalui kearifan lokal, kebiasaan, modal sosial atau tradisi.

Tabel 4. Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat

Penulis & Tahun	Sumber		Metode Analisis	Temuan
	Publikasi	Data		
Johzes H. F. Leunufna, Wardis Girsang, Izaac T. Matitaputty (2022)	AGRILAN: Jurnal Agribisnis Kepulauan. Volume 10 No. 3 Oktober 2022	Sekunder, dan data primer (observasi lapangan).	SWOT	Nilai skor pada strategi SO (Strength - Opportunities) sebesar 3,24 strategi WO (Weaknesses - Opportunities) sebesar 2,36 strategi WT (Weaknesses - Threats) sebesar 2,13 dan strategi ST (Strength - Threats) sebesar 3,01 Skor perhitungan tertinggi berada pada kuadran 1 sebesar 3,24 dengan strategi SO (Strength - Opportunities). Kuadran ini menggambarkan situasi yang sangat menguntungkan untuk pengembangan komoditas unggulan jagung karena memiliki kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
Rola Pola Anto, La Ode Sahili, Sitti Rahmatyah, Gunawan, Risman Togala (2022)	Jurnal Penelitian. Vol.2 No.10 Maret 2022	Inovasi Primer: Wawancara	Kualitatif	Potensi modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan berhasil diidentifikasi adanya social networking, yakni adanya jaringan sosial bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, social economic networking adanya jaringan jual-beli hasil bumi dan produksi tertentu; mutual trust adanya rasa saling percaya secara turun-temurun, reciprositas adanya perilaku saling tolong-menolong yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat; value and social norm, adanya nilai dan norma sosial sebagai warisan secara turun-temurun yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan participation in

Etty Sri Wahyunia, Henry Aspanb, Fadlanc, Angelina E. Rumengand, Faris Ramadhane, Sri Wahyunif, Randi Rian Putra (2023)	Community Engagement & Emergence Journal Volume 3 Nomor 3, Desember 2023	Prmer	Research and development dalam proses pengembangan produk digital berupa aplikasi lelang hasil laut.	social organization yakni adanya organisasi sosial/perkumpulan usaha yang tumbuh dari bawah melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini penting bagi penelitian selanjutnya.
---	--	-------	--	---

Upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat dilakukan melalui mekanisme kearifan lokal atau tradisi dan telah berlangsung secara turun-temurun. Mekanisme tersebut dianggap memiliki dampak yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat sehingga lama-kelamaan dijadikan sebagai pedoman hidup (role of life).

DETERMINAN KEMISKINAN PADA WILAYAH KEPULAUAN

Mendiskusikan kemiskinan selama ini berpatokan pada data BPS yang memperlihatkan bahwa dalam menentukan jumlah orang miskin, BPS menggunakan batas atau garis miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan dan pakaian patokan 2100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (Rumeon et al., 2022).

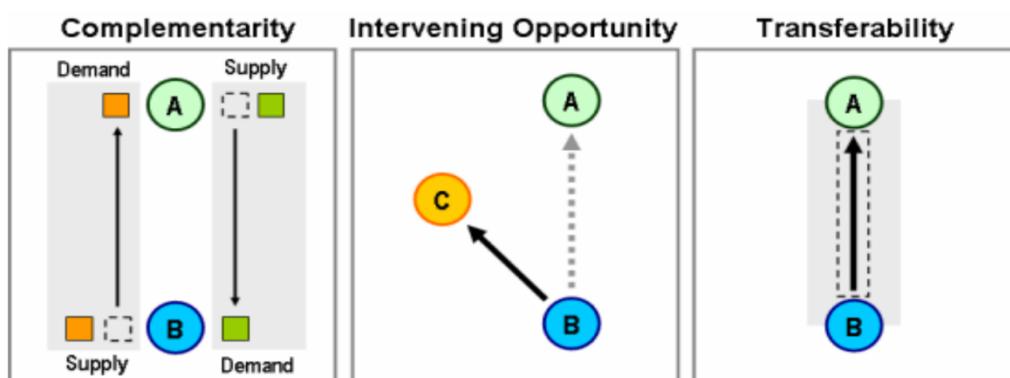
Walaupun demikian, isu kemiskinan menjadi sangat kompleks pada wilayah kepulauan dan memang diakui bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat lebih dominan disebabkan oleh aspek makro ekonomi dibandingkan kondisi alamiah. Bahkan, keberadaan geografis Propinsi Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil makin mempersulit rentang kendali pembangunan, sehingga pada aras ini penulis berpendapat bahwa, kemiskinan di Propinsi Maluku lebih disebabkan karena faktor kemiskinan struktural, sosial dan kultural. Pandangan ini memperlihatkan bahwa, pola pembangunan di Propinsi Maluku belum merata walaupun pelimpahan wewenang untuk mengatur pembangunan di masing-masing kabupaten/kota telah dilegitimasikan. Selain itu pula, keberadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tatatan kelembagaan dan kebijakan pembangunan yang belum optimal turut menjadi penyumbang kemiskinan (Ovaliani, et al., 2023). Sementara kemiskinan dari aspek kultural disebabkan oleh sikap, perilaku atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan yang cenderung menjebak seseorang dalam kemiskinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan sehingga kemiskinan antar wilayah di Propinsi Maluku berbeda satu sama lain dan cenderung bervariasi.

Hal ini mengindikasikan bahwa, karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak seragam. Ketidakseragaman ini turut berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya justru tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah yang akhirnya menyebabkan kemiskinan.

Sehingga, dapat dikatakan jika karakteristik geografis suatu daerah juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Provinsi Maluku yang berkarakteristik wilayah kepulauan menyumbang variasi sebaran kemiskinan yang semakin tinggi. Dimana, sebagian besar masyarakat di provinsi ini masih berada di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan pun tidak terelakan antara

kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku. Hal ini harus dicermati dengan serius oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi ini agar merencanakan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di wilayah ini dapat mempertimbangkan geografis daerah.

Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa, kunci utama penanganan kemiskinan pada wilayah kepulauan adalah konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku yang menghubungkan daerah pedesaan dan daerah perkotaan sebagai kutub pertumbuhan. Peningkatan konektivitas antar pulau tidak hanya terkait dengan biaya transportasi dan pengiriman, tetapi juga berbagai jenis sistem transportasi, yang mencakup fasilitas transportasi darat, laut, sungai dan udara. Hal ini harus direncanakan secara teliti untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakefisienan yang menghabiskan biaya (Yetty, et al., 2021). Kemudian, terkait karakteristik hubungan antar wilayah, Ulman (1956) mengelompokkan karakteristik hubungan fungsional antar wilayah menjadi tiga kategori yaitu: proses hubungan yang bersifat Complementarity, Intervening Opportunity dan Transferability antar wilayah atau pulau-pulau.



Sumber: Ulman (1956)

Gambar 2. Karakteristik Hubungan Antar Wilayah

Proses Complementarity, adalah hubungan yang terjadi antara dua wilayah sebagai akibat adanya suatu proses saling melengkapi satu dengan lainnya, dimana wilayah yang satu men-supply demand dari wilayah lainnya. Proses Intervening Opportunity, adalah hubungan yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sebagai akibat adanya tawaran yang lebih menguntungkan dibandingkan wilayah lainnya. Proses Transferability, adalah hubungan yang terjadi antar dua wilayah sebagai akibat adanya infrastruktur yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Semakin besar peningkatan pembangunan konektivitas dalam bentuk infrastruktur akan mendorong kegiatan distribusi barang dan jasa berjalan efektif. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pembangunan di daerah baik secara sektor maupun secara kewilayahan akan lebih berkembang. Proses distribusi yang lancar menjamin kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat sehingga ketersediaan barang untuk aktivitas konsumsi dan produksi selalu tersedia, dampaknya secara positif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, adanya kemudahan aksesibilitas melalui konektivitas antar wilayah atau pulau dapat memudahkan upaya pemerataan pembangunan yang selama ini masih terhambat sehingga lambat-laun akan menurunkan angka kemiskinan pada wilayah kepulauan itu sendiri.

KESIMPULAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang bersifat multidimensional sehingga upaya penanganannya tidak hanya dapat mengandalkan faktor ekonomi semata saja. Akan tetapi memerlukan beragam penanganan dengan turut melibatkan masyarakat. Kemiskinan pada wilayah kepulauan selama ini masih erat dikaji melalui variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan dan sebagainya. Terlebih lagi, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah seringkali belum tepat sasaran yakni masyarakat miskin. Hal tersebut makin diperumit dengan kenyataan bahwa, daerah kepulauan memiliki kelemahan terkait konektivitas antar pulau pada wilayah kepulauan tersebut. Sehingga upaya penanganan kemiskinan melalui

kebijakan dan program kerja pada wilayah kepulauan perlu mempertimbangkan koneksi antar pulau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114–132.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2023). *Maluku Dalam Angka*.
- Bahauddin, A., Fatmawati, A., & Sari, F. P. (2021). Analisis Clustering Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Algoritma K-Means. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 4(1), 1–8.
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228.
- Imania, K., Soraida, S., & Seftiani, N. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. *JIPAN: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Dan Administrasi Negara*, 1–18.
- Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(2), 108–126.
- Latuny, E. M., & Matitaputty, I. T. (2020). Kajian Kemiskinan Pada Tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Pertanian Kepulauan*, 4(1), 30–36.
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93–104.
- Rumeon, R., Talakua, M. W., & Persulessy, E. R. (2022). Penggunaan Analisis Diskriminan Dalam Menentukan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku Tahun 2015. *PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 1(1), 15–28.
- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis determinasi kemiskinan di Indonesia studi kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Todaro, Michael P. Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218.